

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan total jumlah penduduknya sebesar 270 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk demikian besarnya, tentunya membuat tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak setiap warga negara menjadi semakin besar. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihantui oleh permasalahan mengenai ketahanan pangan.

Ketahanan pangan sendiri merupakan kondisi Dimana negara sampai dengan individu memiliki akses yang mudah dan cukup terhadap sumber pangan. Sebagai negara kepulauan tentunya bukan hal yang mudah bagi Indonesia dalam melakukan distribusi pangan dari satu pulau ke pulau lainnya, hal ini disebabkan karena kurang memadainya infrastruktur di beberapa daerah. Terutama daerah yang berada di luar Pulau Jawa, sementara sebagian besar masyarakat Indonesia masih menjadikan beras sebagai sumber utama karbohidrat yang produsen terbesarnya berasal dari Pulau Jawa.

Persoalan ketahanan pangan yang terjadi di Indonesia berupa kerentanan pangan, malnutrisi, stunting pada anak, kemiskinan, serta akses terhadap pelayanan Kesehatan. Salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami persoalan ketahanan pangan adalah Provinsi Maluku, Dimana dalam Pemetaan Daerah Rawan Pangan dan Kerentanan Pangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa Provinsi Maluku berada pada daerah prioritas golongan ketiga. Pada tahun 2018, Provinsi Maluku sendiri mencatat tingkat stunting pada anak sebesar 30%, yang mana angka ini lebih besar dari standar yang telah ditetapkan oleh WHO selaku organisasi Kesehatan dunia.

Pengelompokkan ini berkaitan erat dengan aspek-aspek ketahanan pangan menurut FAO yang dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Selain itu permasalahan dalam ketahanan pangan juga merupakan persoalan

yang kompleks karena saling berkaitan satu sama lain, seperti kemiskinan, kelaparan, pendidikan, sanitasi, dan juga fasilitas kesehatan,

Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan yang sedemikian kompleksnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian sebagai Lembaga pemerintahan yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan pangan, menjalin Kerjasama dengan FAO, yang merupakan Organisasi Internasional yang juga berfokus dalam bidang pangan serta pertanian untuk mengatasi permasalahan kelaparan secara global. Kerjasama yang terjalin dengan FAO dapat berupa bantuan finansial maupun non-finansial.

Obor Pangan Lestari (OPAL) merupakan program masyarakat yang terjalin pada tahun 2019 antara Kementerian Pertanian dan didukung oleh FAO sebagai upaya dalam mengatasi tingginya angka stunting di Indonesia. Program OPAL merupakan program nasional, dimana pelaksanaannya dilakukan diseluruh provinsi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, program OPAL ini merupakan program lanjutan dari KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), konsep antara program OPAL dengan KRPL memiliki kesamaan, yaitu apabila di KRPL mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan baik rumah, maka OPAL mengajak agar seluruh pegawai perkantoran Eselon I untuk memanfaatkan lahan yang tersedia, sebagai lahan percontohan bagi masyarakat. Selain itu pemanfaatan lahan pekarangan ini juga sebagai sumber pangan dan gizi, yang diharapkan mampu mewujudkan kemandirian pangan yang berasal dari sumber daya lokal melalui pemanfaatan pekarangan sehingga mampu menghasilkan kesejahteraan bagi rumah tangga.

Dengan diadakannya program OPAL ini diharapkan agar masyarakat dapat menanam dan menghasilkan sendiri sumber pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan ini. Karena dalam pelaksanaannya program OPAL ini tidak berfokus hanya kepada tanaman sayur aja, namun juga pada buah-buahan, tanaman obat, bahkan dalam pemberdayaan hewan ternak apabila kondisi lahan dan lingkungan memungkinkan. Nantinya, hasil panen dari OPAL ini sendiri dapat disalurkan kepada komunitas atau kelompok DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), yang nantinya akan diolah dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu hasil panen juga dapat

dikonsumsi secara pribadi sebagai upaya meningkatkan konsumsi sayur harian, dan juga dapat dijual melalui TAGRIMART yang juga merupakan program dari Kementerian Pertanian.

Namun, dalam pelaksanaannya program OPAL ini belum memberikan efek yang signifikan dalam penurunan angka stunting di Maluku. terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi oleh lembaga terkait tentang program percontohan OPAL ini. Sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa pemerintah sedang mengembangkan program dalam rangka mengatasi kerentanan pangan dengan pemanfaatan lahan pekarangan, terbatasnya persediaan air bersih untuk melakukan penyiraman terhadap tanaman, hal ini juga disebabkan karena kondisi iklim yang tidak pasti sehingga menyebabkan beberapa daerah mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang berkepanjangan, banyaknya serangan hama tanaman yang membuat hasil panen tidak maksimal. Selain itu terbatasnya sumber dana pelaksanaan juga menjadi salah satu faktor penghambat pelancaran program ini.

Cara penyelesaian tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program OPAL ini adalah dengan dilakukan diskusi lebih lanjut antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu dibenahi.

Selain itu, Sebagai negara agraris Indonesia juga memiliki potensi laut yang sangat besar, dengan posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikan wilayah perairan laut Indonesia sebagai perairan berproduksi tinggi dengan daya dukung alam yang juga kuat. Berdasarkan data statistic yang dirilis oleh FAO pada tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya.

Maluku telah diinisiasikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) sejak tahun 2010. Melalui LIN ini maka berbagai infrastruktur pendukung seperti Pelabuhan perikanan terpadu, Kawasan industry perikanan, sampai bandara internasional yang mampu membawa hasil tangkapan produk perikanan di 3 WPPNRI ke pasar internasional juga akan dibangun, sebagai Upaya memperlancar aktivitas perekonomian. Perencanaan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional ini didasarkan karena terdapat potensi pada perairan Maluku yang juga

termasuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu laut Seram, laut Arafura, dan laut banda yang memiliki sumber daya perikanan yang melimpah.

Selain dari sektor kelautan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menjalin Kerjasama dengan FAO dalam program kerja yang Bernama IFish, Dimana program ini didanai oleh GEF (*Global Environment Facility*) yang bernilai sekitar 6,1 juta dolar AS atau setara dengan Rp88,37 miliar. Melalui program ini pemerintah Indonesia Bersama dengan FAO akan mengembangkan pengelolaan pemanfaatan berkelanjutan guna meningkatkan perlindungan pada ekosistem air tawar yang bernilai tinggi dan keanekaragaman hayatinya di Indonesia.

## 5.2 Saran

Berkaitan dengan implemantasi kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian dan *Food and Agriculture Organization* dimana dalam menyelesaikan permasalahan terkait ketahanan pangan, ketersediaan pangan yang cukup menjadi fokus utama yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kasus kelaparan, kemudian tingkat pendapatan ekonomi masyarakat di Indonesia yang juga harus dilakukan pembenahan oleh seluruh sektor pemerintahan karena pendapatan ekonomi rumah tangga juga menjadi salah satu faktor dalam kesejahteraan yang dalam kasus kerentanan pangan juga berkaitan erat dengan kemiskinan. Selain itu infrastruktur daerah di Indonesia jangan hanya difokuskan di Pulau Jawa saja, pembangunan infrastruktur yang masif harus segera di lakukan terutama di daerah pelosok yang akses jalan utamanya masih sulit dilalui oleh kendaraan roda empat, yang dapat menyebabkan terhambatnya proses distribusi pangan. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak bisa berjalan dengan optimal tanpa adanya partisipasi dari kelompok masyarakat, oleh sebab itu proses sosialisasi sebelum program mulai berjalan amatlah sangat penting. Hal ini untuk menghindari program yang telah direncanakan selama kurun waktu tertentu menjadi sia-sia, dan uang pendanaan dapat diserap sebagaimana mestinya agar dapat memberikan efek yang signifikan bagi perubahan penurunan kerentanan pangan pada anak di Maluku.